

**SISTEM MILITER DALAM TENTARA ISLAM INDONESIA (TII)
DI JAWA BARAT PADA MASA KARTOSUWIRYO (1948-1962)**

RINGKASAN SKRIPSI



Oleh:
RENO APRILIA DWIJAYANTO
08406241012

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN SEJARAH
JURUSAN PENDIDIKAN SEJARAH
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2014**

SISTEM MILITER DALAM TENTARA ISLAM INDONESIA (TII) DI JAWA BARAT PADA MASA KARTOSUWIRYO (1948-1962)

Oleh

Reno Aprilia Dwijayanto dan M. Nur Rokhman, M.Pd.

ABSTRAK

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk: (1) mengetahui sekilas riwayat kehidupan Kartosuwiryo; (2) mengetahui terbentuknya TII tahun 1948; (3) menjelaskan organisasi militer dan siasat gerilya TII; (4) menjelaskan perekrutan anggota, persenjataan dan komando perang TII; dan (5) mengetahui berakhirnya TII di Jawa Barat pada masa Kartosuwiryo tahun 1962.

Penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto yang terdiri dari empat langkah, yakni: (1) *Heuristik*, yaitu kegiatan menghimpun jejak-jejak masa lalu yang dikenal dengan sumber sejarah; (2) *Kritik Sumber*, kegiatan meneliti jejak atau sumber sejarah yang telah dihimpun sehingga diperoleh fakta sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan; (3) *Interpretasi*, yaitu menetapkan makna yang saling berhubungan dari fakta-fakta sejarah yang telah diperoleh; (4) *Historiografi*, yaitu kegiatan menyampaikan sintesa yang telah diperoleh ke dalam bentuk karya sejarah.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) kartosuwiryo merupakan tokoh utama dibalik pemberontakan DI/TII Jawa Barat dan sekaligus sebagai panglima tertinggi TII; (2) organisasi militer TII tersusun dalam bentuk satuan-satuan militer; yang terdiri dari satuan tingkat divisi, resimen, batalyon, kompi, peleton dan regu; (3) siasat gerilya TII antara lain yaitu taktik timbul dan tenggelam, gerakan cepat, taktik menghadapi musuh, menembus blokade musuh dan gerakan bersama; (4) anggota-anggota TII diperoleh dari bekas anggota Pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta semua organisasi Islam yang berada di Jawa Barat; bekas tentara KNIL; Polisi Belanda; Polisi Perkebunan dan dari kalangan penduduk biasa. Persenjataan TII diperoleh terutama dari hasil rampasan perang, baik melawan Tentara Jepang, Tentara Belanda maupun TNI. Komando perang TII dibagi menjadi tujuh Daerah Perang atau Sapta Palagan. Tiap-tiap daerah perang dibagi menurut luas wilayahnya dan pada tiap-tiap daerah perang tersebut dipimpin oleh seorang Komandan TII; (5) adanya operasi Pagar Betis yang kemudian dilanjutkan dengan operasi Brata Yudha pada akhirnya TII dibawah pimpinan Kartosuwiryo berhasil ditumpas oleh TNI pada tahun 1962.

Kata Kunci: Sistem Militer, Tentara Islam Indonesia

I. Pendahuluan

Pada masa Kolonial Belanda kedudukan Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo adalah sebagai teman seiring dari pejuang-pejuang kemerdekaan RI, namun dalam masa mempertahankan kemerdekaan RI, ketika pemerintah RI lebih memilih untuk menempuh jalan perundingan diplomasi dengan Belanda—dari Linggarjati sampai Renville, Kartosuwiryo selalu berada pada posisi yang tidak setuju dengan hasil perundingan-perundingan tersebut. Sikap perlawanan terhadap pemerintah RI itu yang kemudian membawanya untuk menentang pemerintah RI, yaitu dengan

memproklamasikan berdirinya NII (Negara Islam Indonesia) pada tanggal 7 Agustus 1949 yang berpusat di Jawa Barat.

Sikap dan aksi tindakan yang telah dilakukan oleh Kartosuwiryo kemudian oleh pemerintah RI disebut dengan sebuah aksi pemberontakan. Kartosuwiryo yang merasa kecewa dengan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh pemerintah RI pada akhirnya memilih jalan menjadi seorang pemberontak (Ruslan, dkk., 2008: vii). Ia kemudian menjadi pemimpin pemberontakan DI/TII (Darul Islam/Tentara Islam Indonesia) di Jawa Barat, dengan pasukannya yang diberi nama Tentara Islam Indonesia (TII).

Penandatanganan perjanjian Renville telah memecah belah kekuatan RI. Perjanjian ini ditandatangani oleh Pemerintah RI dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville (Ida Anak Agung Gde Agung, 1991: 71). Dari hasil perjanjian itu wilayah RI di pulau Jawa hanya meliputi sebagian wilayah Jawa Tengah dan Banten. Hal ini membawa akibat anggota tentara harus ditarik dari wilayah pendudukan Belanda dan harus pindah ke wilayah RI yang sempit. Di daerah Jawa Barat, tentara yang telah menempati daerah yang strategis untuk melakukan gerilya terpaksa harus segera melakukan hijrah ke daerah RI. Sebagian besar pasukan Divisi Siliwangi dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Pada waktu pasukan Divisi Siliwangi melaksanakan hijrah ke daerah Jawa Tengah, tidak semua kesatuan tentara ikut serta melakukan hijrah. Mereka yang tidak ikut hijrah terus melakukan perang gerilya di daerah Jawa Barat. Kesatuan tentara yang tidak ikut hijrah diantaranya ialah pasukan Sabilillah dan Hizbullah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo.

Dengan melihat situasi dan kondisi seperti tersebut di atas maka dengan segera Kartosuwiryo memanfaatkan keadaan. Pada tanggal 10-11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya, ia beserta kawan seperjuangannya seperti Raden Oni dan Kamran mengadakan suatu konferensi yang berhasil membentuk TII.

Organisasi militer TII yang dibentuk oleh Kartosuwiryo tersusun dalam bentuk satuan tingkat divisi, resimen, batalyon sampai pada satuan tingkat regu. Namun dalam setiap taktik dan gerakannya, TII tidak pernah bergerak dalam satuan yang besar. Kegiatan mereka paling besar hanya sampai pada satuan tingkat batalyon (Disjarah TNI AD, 1985: 113).

Inti dari kekuatan TII terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang tidak mau masuk menjadi anggota TNI. Selain itu untuk menambah kekuatan tempur TII, pihak DI/TII merekrut pemuda-pemuda desa untuk dijadikan sebagai anggota TII. Sementara

modal persenjataan TII diperoleh dari hasil rampasan perang, terutama pada waktu TII melakukan pertempuran-pertempuran melawan Tentara Belanda maupun melawan TNI.

Pada tahun 1959 keadaan TII semakin terdesak akibat adanya operasi penumpasan yang terus dilancarkan oleh TNI. Hal ini mendorong Kartosuwiryo untuk membentuk suatu komando perang. Pembentukan komando perang tersebut ditujukan kepada TII dengan tujuan untuk memperhebat jalannya perang di seluruh Indonesia.

TNI telah melancarkan operasi penumpasan terhadap pemberontakan DI/TII di Jawa Barat. Upaya tersebut mulai dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1950. Namun upaya tersebut belum mendapat hasil yang memuaskan. Kemudian operasi-operasi penumpasan terhadap pemberontakan DI/TII di Jawa Barat lebih diintensifkan lagi dengan mencetuskan doktrin perang wilayah. Seluruh rakyat dilibatkan sepenuhnya dalam pelaksanaan operasi penumpasan. Sistemnya antara lain dikenal dengan operasi Pagar Betis dan dilanjutkan dengan operasi Brata Yudha. TII telah berusaha untuk mengimbangi perlawanan yang dilancarkan oleh TNI, akan tetapi mereka mengalami kegagalan karena rakyat tidak mau membantu. Akibatnya TII kemudian melakukan tindakan-tindakan yang membabi-buta dan melakukan teror secara massal terhadap rakyat di Jawa Barat.

Rahasia TII dalam melakukan perang gerilya yang sanggup bertahan lama hingga tahun 1962 itu tentu tidak terlepas dari adanya suatu sistem militer yang baik dalam tubuh TII. Sistem militer merupakan tata cara suatu negara untuk dapat mengatur sekumpulan orang-orang yang mempunyai ciri berbeda dari orang-orang sipil, yang terorganisir dan dipersenjatai, yang berperan di bidang pertahanan dan keamanan. NII sebagai sebuah negara tentunya telah menciptakan sebuah sistem untuk merekrut, melatih dan mempergunakan militernya itu. Dengan adanya sebuah sistem militer yang terorganisasi dengan baik ini maka pada akhirnya TII dengan kegigihan dan keuletan yang dimilikinya mampu menghadapi setiap usaha penumpasan yang dilakukan oleh TNI.

A. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan telaah terhadap pustaka atau teori yang menjadi landasan pemikiran (A. Daliman, 2006: 3). Pada penulisan skripsi ini menggunakan buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan topik sistem militer dalam TII di Jawa Barat pada masa Kartosuwiryo antara kurun waktu 1948 sampai dengan tahun 1962. Penyusunan kajian pustaka berpatokan pada masalah yang diajukan dalam rumusan masalah.

Pembahasan mengenai sosok Kartosuwiryo akan dibahas dengan menggunakan buku karya Irfan S. Awwas yang berjudul *Trilogi kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Mengungkap Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler* yang diterbitkan di Yogyakarta oleh USWAH tahun 2008. Penulis juga menggunakan buku karya Pinardi yang berjudul *Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo* yang diterbitkan di Jakarta oleh Aryaguna tahun 1964.

Pembahasan mengenai terbentuknya TII akan dibahas dengan menggunakan buku karya Al-Chaidar yang berjudul *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam* yang diterbitkan di Jakarta oleh Darul Falah tahun 1999. Penulis juga menggunakan buku karya Holk Harald Dengel yang berjudul *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal* yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Sinar Harapan tahun 1995.

Pembahasan mengenai organisasi militer dan siasat gerilya TII akan dibahas dengan menggunakan buku karya Disjarah TNI AD yang berjudul *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat* yang diterbitkan di Bandung oleh Disjarah TNI AD tahun 1985. Penulis juga menggunakan buku karya Al-Chaidar yang berjudul *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam* yang diterbitkan di Jakarta oleh Darul Falah tahun 1999.

Pembahasan mengenai perekrutan anggota, persenjataan dan komando perang TII akan dibahas dengan menggunakan buku karya Pinardi yang berjudul *Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo* yang diterbitkan di Jakarta oleh Aryaguna tahun 1964. Penulis juga menggunakan buku karya Holk Harald Dengel yang berjudul *Darul Islam dan Kartosuwiryo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal* yang diterbitkan di Jakarta oleh Pustaka Sinar Harapan tahun 1995.

Pembahasan mengenai akhir dari TII di Jawa Barat pada masa Kartosuwiryo akan dibahas dengan menggunakan buku karya Disjarah TNI AD yang berjudul *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat* yang diterbitkan di Bandung oleh Disjarah TNI AD tahun 1985. Penulis juga menggunakan buku karya Amak Sjariffudin yang berjudul *Kisah Kartosuwirjo dan menjerahnja* yang diterbitkan di Surabaya oleh Grip tahun 1962.

B. Historiografi yang Relevan

Historiografi yang relevan merupakan kajian-kajian historis yang mendahului penelitian dengan tema atau topik yang hampir sama. Tujuan dari historiografi yang relevan sendiri adalah untuk membedakan karya sejarah yang akan ditulis dengan karya sejarah yang sudah ditulis terlebih dahulu. Dalam penulisan skripsi ini penulis menemukan historiografi yang relevan sebagai berikut.

Historiografi relevan yang pertama adalah tesis yang berjudul “Lajur Kanan Sebuah Jalan: Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan (Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940-1962)” yang ditulis oleh Bambang Imam Eka Respati Sabirin dari Jurusan Ilmu Pengetahuan Budaya, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Pascasarjana Universitas Indonesia. Tesis ini menjelaskan mengenai pemikiran Kartosuwiryo dan aksi-aksinya yang melahirkan KPK PSII, Institut Suffah dan Konferensi Cisayong 1948, yang merupakan tonggak-tonggak melahirkan Negara Islam. Perbedaan tesis tersebut dengan skripsi penulis terletak pada pembahasannya. Tesis yang ditulis Bambang Imam Eka Respati Sabirin lebih memfokuskan pada pemikiran dan aksi-aksi Kartosuwiryo dalam mewujudkan terbentuknya Negara Islam sedangkan tulisan penulis lebih memfokuskan pada sistem militer dalam TII masa Kartosuwiryo. Persamaan antara tesis yang ditulis Bambang Imam Eka Respati Sabirin dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menelaah tentang riwayat kehidupan Kartosuwiryo.

Historiografi relevan yang kedua yaitu skripsi yang berjudul “Peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat (1949-1962)” yang ditulis oleh Lia Rohmawati dari Jurusan Pendidikan Sejarah, FISE, Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi ini menjelaskan tentang peranan Divisi Siliwangi dalam upayanya menumpas gerakan Darul Islam di Jawa Barat. Perbedaan skripsi ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus penelitiannya. Skripsi Lia Rohmawati memfokuskan pada peranan Divisi Siliwangi dalam penumpasan pemberontakan DI/TII di Jawa Barat pimpinan Kartosuwiryo, sedangkan skripsi penulis membahas mengenai sistem militer dalam TII masa Kartosuwiryo. Persamaan antara skripsi yang ditulis oleh Lia Rohmawati dengan skripsi penulis yaitu sama-sama menelaah tentang riwayat kehidupan Kartosuwiryo.

C. Metode dan Pendekatan Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah menurut Nugroho Notosusanto. Penelitian sejarah mempunyai empat tahap, yaitu: (1) heuristik, (2)

kritik sumber (verifikasi), (3) interpretasi, dan (4) penyajian atau historiografi (Nugroho Notosusanto, 1971: 35).

a. Heuristik

Heuristik adalah suatu kegiatan mencari, mengumpulkan, mengkategorikan, dan meneliti sumber-sumber sejarah termasuk yang ada dalam buku referensi (Hugiono, dkk., 1992: 30). Sumber yang didapat dikategorikan menjadi dua macam, yaitu sebagai berikut:

1) Sumber Primer

Sumber primer atau sumber pertama dianggap sumber asli (orisinil), yaitu evidensi atau bukti sejaman dengan suatu peristiwa yang terjadi (Helius Sjamsuddin dan Ismaun, 1996: 61). Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan sumber primer berupa tulisan asli yang ditulis langsung oleh Kartosuwiryo. Karya tersebut kemudian dimuat dalam buku karangan Al-Chaidar yang berjudul *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosuwiryo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. 1999. Jakarta: Darul Falah.

2) Sumber Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang berasal dari seseorang yang bukan pelaku atau saksi dari peristiwa tersebut, dengan kata lain hanya tahu dari kesaksian orang lain (I Gde Widja, 1989: 18). Adapun sumber sekunder yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Disjarah TNI AD. (1985). *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosuwiryo di Jawa Barat*. Bandung: Disjarah TNI AD.

Holk Harald Dengel. (1995). *Darul Islam dan Kartosuwirjo: Langkah Perwujudan Angan-angan yang Gagal*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Irfan S. Awwas. (2008). *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: Uswah.

Pinardi. (1964). *Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo*. Jakarta: Arya Guna.

b. Verifikasi (Kritik Sumber)

Kritik sumber adalah usaha dan upaya menyelidiki apakah jejak-jejak yang ditemukan setelah heuristik benar adanya, sah, dan betul-betul dapat

dijadikan bahan penulisan (I Gde Widja, 1989: 18). Kritik sumber ada dua macam, yaitu :

1) Kritik Ekstern

Kritik Ekstern adalah melakukan verifikasi atau pengujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah (Helius Sjamsuddin, 2007: 132). Peneliti melakukan penelitian terhadap keaslian sumber dokumen, yang meliputi sumber tanggal waktu dan pengarangnya, mengenai keaslian dari kertas yang dipakai, ejaan tulisan, jenis tinta dan semua jenis penampilan luarnya untuk mengetahui otentisitasnya.

2) Kritik Intern

Kritik intern mengacu pada kebenaran isi sumber-sumber sejarah. Kritik intern dapat dilakukan dengan dua cara yaitu menilai secara intrinsik sumber-sumber sejarah dan membandingkan berbagai sumber sejarah. Penilaian intrinsik dilakukan dengan menentukan sifat sumber-sumber sejarah dan kredibilitas narasumber atau penulis sejarah. Maksudnya peneliti menentukan apakah keterangan atau informasi yang diberikan oleh saksi atau narasumber tersebut benar atau tidak. Peneliti membandingkan berbagai sumber sejarah dapat dilakukan dengan cara menguji kebenaran berbagai kesaksian sumber-sumber sejarah yang ada. Hal tersebut dilakukan oleh peneliti dengan cara mencocokkan kesaksian satu sumber sejarah dengan sumber sejarah lainnya untuk memastikan bahwa kesaksian atau informasi yang diperoleh kredibel.

c. Interpretasi

Interpretasi adalah fakta yang ada ditafsirkan sehingga ditemukan struktur logisnya (Hariyono, 1995: 110). Dalam penafsiran, fakta-fakta tersebut dilihat hubungan, keterkaitan, disesuaikan dengan tema sehingga kegunaan sebagai bahan dasar penulisan dapat terpenuhi.

d. Penyajian

Penyajian atau historiografi adalah pelukisan sejarah, gambaran sejarah tentang peristiwa masa lalu yang disebut sejarah (Helius Sjamsuddin, 1996: 16). Penyajian ini hendaknya mampu memberikan gambaran mengenai proses penelitian dari awal sampai penarikan kesimpulan. Tahap ini merupakan tahap akhir untuk menyajikan semua fakta ke dalam bentuk

tulisan. Hasil dari historiografi ini adalah skripsi yang berjudul “Sistem Militer dalam TII di Jawa Barat Pada Masa Kartosuwiryo (1948-1962)”.

2. Pendekatan Penelitian

Penggambaran suatu peristiwa sangat bergantung pada pendekatan dan dari mana kita memandangnya, dimensi mana yang diperhatikan, unsur-unsur mana yang ingin diungkapkan, dan lain sebagainya (Sartono Kartodirdjo, 1993: 4). Pendekatan yang dilakukan akan memberikan bantuan dalam menganalisis sebuah kejadian. Berdasarkan peristiwa yang sedang diteliti, yaitu sistem militer dalam TII di Jawa Barat pada masa Kartosuwiryo (1948-1962), maka penulis menggunakan pendekatan politik, sosiologis, ekonomi, militer dan agama.

II. Sekitar Terbentuknya Tentara Islam Indonesia (TII)

A. Sekilas Riwayat Kehidupan Kartosuwiryo

Kartosuwiryo lahir pada hari selasa kliwon tanggal 7 Februari 1905 di Cepu, Jawa Tengah (Pinaridi, 1964: 20). Ia adalah seorang tokoh radikal Islam di Indonesia yang paling utama dan berpengaruh hingga sekarang. Ia merupakan konseptor dan sekaligus pelaksana gagasannya tentang negara Islam. Pada tanggal 7 Agustus 1949, ia memproklamasikan NII secara resmi di Desa Cidugaleun, Kecamatan Cigalontang, Singaparna, Tasikmalaya, Jawa Barat (Irfan S. Awwas, 2008: 217). Tindakannya tersebut kemudian menimbulkan perang saudara. Pada akhirnya ia tertangkap oleh pasukan RI pada tanggal 4 Juni 1962 dan menjalani hukuman mati tiga bulan kemudian di sebuah pulau yang berada di sekitar teluk Jakarta.

B. Situasi dan Kondisi Jawa Barat Pasca Perjanjian Renville

1. Letak dan Kondisi Geografis

Jawa Barat terletak di bagian Pulau Jawa pada posisi 5°50'-7°50' Lintang Selatan dan antara 104°48'-108°48' Bujur Timur. Di sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, di sebelah Selatan dengan Samudera Indonesia, di sebelah Barat dengan Selat Sunda, dan di sebelah Timur dengan wilayah propinsi Jawa Tengah (Intermassa, 1992: 27). Luas wilayah Jawa Barat ialah 46.890 km².

Sebagian besar wilayah Jawa Barat merupakan daerah pegunungan. Sebagian dari gunung tersebut merupakan gunung berapi yang menjamin kesuburan wilayah itu. Jumlah gunung di Jawa Barat pun cukup banyak, seperti Gunung Rakata, Gunung Karang, dan Gunung Pulosari yang letaknya di Banten hingga Gunung Ciremai di Majalengka. Jawa Barat juga dikenal sebagai daerah

perkebunan, baik perkebunan tebu, kopi, karet, kina, teh maupun tanaman lainnya. Daerah perkebunan tersebut tersebar di daerah dataran rendah dan pegunungan di daerah Ciasem, Pamanukan, Bogor, Cirebon, Karawang, Indramayu, dan Priangan (Disjarah TNI AD, 1985: 47). Perkebunan teh berada di sekitar Pangalengan dan Gunung Patuha, sedangkan perkebunan kina ada di Cinyuruan, Kabupaten Bandung. Ada juga perkebunan karet di Kabupaten Bandung, Tasikmalaya dan Ciamis (Nina H. Lubis, 1998: 26-28).

2. Kondisi Sosial dan Ekonomi

Masyarakat Jawa Barat hampir seluruh penduduknya merupakan penganut agama Islam dan dikenal sebagai penganut yang teguh. Sebagian besar dari mereka itu merupakan golongan Islam yang fanatik. Oleh karena itu, banyak tokoh-tokoh Islam Jawa Barat mengharapkan agar Negara Indonesia berdiri sebagai negara yang berdasarkan Islam. Sebagian besar penduduk Jawa Barat, terutama penduduk yang tinggal di pedesaan dan pegunungan, tergolong orang-orang yang berpendidikan rendah dan kurang mampu secara finansial. Penduduk Jawa Barat yang menetap di desa-desa dan pegunungan itu, pada umumnya terdiri dari petani-petani sederhana, baik sederhana dalam berpikir dan juga sederhana dalam tingkah lakunya. Kesadaran politik mereka pada waktu itu juga masih rendah. Demikian juga kekuatan keuangan penduduk pada umumnya sangat berbanding terbalik dengan sebagian kecil kelompok penguasa. Sebagian besar penduduk Jawa Barat dengan keterbatasan keuangannya itu, tidak dapat menikmati kemewahan seperti apa yang dialami oleh sebagian kecil kelompok penguasa. Dimana kelompok penguasa mempunyai kecakapan berekonomi dan mempunyai hubungan dengan pedagang-pedagang besar di kota.

3. Situasi Politik

Politik pemerintah RI dalam rangka menanggulangi usaha penjajahan kembali Belanda pada tahun 1945-1949 yang berdasarkan pada politik diplomasi sering mendapat tantangan dari berbagai golongan partai politik. Hal itu terbukti dengan reaksi yang timbul sesudah perjanjian Renville ditandatangani oleh pemerintah RI. Sebagian besar golongan partai politik menentang akan penandatanganan perjanjian Renville. Partai-partai politik yang ikut dalam kabinet Amir Syarifuddin seperti PNI dan Masyumi secara resmi menolak hasil perjanjian Renville yang ditandatangani oleh Amir Syarifuddin tersebut. PNI dan Masyumi menindaklanjuti penolakannya itu dengan menarik menteri-menterinya

dalam kabinet Amir Syarifuddin (G. Moedjanto, 1992: 24). Akibatnya Kabinet Amir Syarifuddin jatuh dan digantikan oleh kabinet baru dengan Wakil Presiden M. Hatta sebagai Perdana Menteri.

Situasi Pemerintah Pusat pada waktu itu didominasi oleh golongan politik tertentu. Dominasi pusat dalam bidang-bidang politik, militer dan ekonomi, tidak disukai oleh golongan partai politik yang ada di Jawa Barat, terutama Kartosuwiryo. Hal itu disebabkan karena Pemerintah Pusat sudah tidak lagi berfungsi, Pemerintah Pusat lebih berusaha untuk kepentingan golongannya. Keadaan yang semacam itu menimbulkan rasa tidak puas bagi Kartosuwiryo. Selain itu Kartosuwiryo juga merasa kecewa dan tidak puas dengan hasil perjanjian Renville, yang mengharuskan pasukan TNI dan laskar-laskar bersenjata lainnya di Jawa Barat *hijrah* ke daerah Jawa Tengah. Ia memilih untuk tetap bertahan di Jawa Barat bersama pasukan *Hizbullah* dan *Sabilillah* untuk meneruskan perjuangannya melawan Belanda dengan cara gerilya.

4. Situasi Militer

Sejak ditandatanganinya perjanjian Renville sebenarnya pihak militer RI kurang menyetujui hasil keputusan tersebut. Namun demikian TNI tetap patuh dan setia terhadap keputusan pemerintah RI meski dengan perasaan yang berat. TNI yang telah menempati dan menduduki daerah-daerah yang strategis dikantong-kantong pendudukan Belanda diperintahkan untuk meninggalkan tempat-tempat tersebut.

Kesatuan-kesatuan yang berada di Jawa Barat tidak seluruhnya hijrah ke Jawa Tengah. Sebagian pasukan memilih untuk tetap berada di Jawa Barat untuk melakukan gerilya melawan Belanda. Kesatuan yang memilih tetap berada di Jawa Barat diantaranya yaitu pasukan *Hizbullah* dan *Sabilillah*. Adapun eselon-eselon Divisi Siliwangi yang hijrah ke Jawa Tengah antara lain yaitu Batalyon Sitorus, Batalyon Ahmad Wiranatakusumah, Batalyon Kemal Idris, Batalyon A. Kosasih, Batalyon Rukman, Batalyon Darsono, Batalyon Lucas, Batalyon Sentot, Batalyon Sudarman, Batalyon Husinsyah, Batalyon Nasuhi, dan Batalyon Rivai (Disjarah TNI AD, 1985: 53).

C. Terbentuknya Tentara Islam Indonesia (TII)

1. Latar Belakang Terbentuknya TII

Pada tanggal 17 Januari 1948 telah ditandatangani Perjanjian Renville. Salah satu ketentuan dalam perjanjian itu yaitu mengharuskan pihak RI

mengosongkan kawasan Jawa Barat dan Divisi Siliwangi harus ditarik ke Jawa Tengah. Pada waktu pengosongan dilakukan, mayoritas penduduk Jawa Barat sama sekali tidak mengerti mengapa Divisi Siliwangi yang mestinya melindungi dan mempertahankan daerah mereka dari Belanda malah meninggalkan mereka. Penduduk Jawa Barat merasa seolah-olah ditinggalkan dan diserahkan begitu saja kepada Belanda. Dengan hijrahnya Divisi Siliwangi maka di Jawa Barat terjadi kekosongan unsur-unsur militer RI. Situasi tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh Kartosuwiryo yang sudah sejak lama menginginkan terbentuknya suatu Negara Islam. Dengan segera Kartosuwiryo menyusun kekuatan untuk mewujudkan cita-citanya mendirikan NII, yakni dengan membentuk TII.

Selanjutnya pada tanggal 30 Januari 1948 Raden Oni selaku komandan Sabilillah berangkat ke Peuteuynunggal, Garut, untuk berunding dengan Kartosuwiryo tentang masalah situasi politik dan militer yang berkembang sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian Renville. Keduanya sepakat bahwa pasukan-pasukan Islam harus tetap berada di Jawa Barat untuk melanjutkan perjuangan bersama-sama dengan rakyat melawan Belanda dan anggota-anggota Pasukan Sabilillah dan Hizbullah yang turut mengundurkan diri melakukan hijrah harus dilucuti senjatanya dengan damai atau dengan secara paksa. Keputusan lain yang sangat penting bahwa akan diadakan konferensi pada tanggal 10-11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan, Kecamatan Cisayong, Tasikmalaya, dimana dalam konferensi itu harus hadir semua pemimpin Islam daerah Priangan (Al-Chaidar, 1999: 72).

2. Proses Terbentuknya TII

Atas anjuran Kartosuwiryo dan Raden Oni maka pada tanggal 10 Januari 1948, telah berkumpul wakil-wakil organisasi Islam yang masih bertahan di Jawa Barat untuk mengadakan konferensi yang akan berlangsung selama dua hari. Konferensi dihadiri oleh 160 wakil-wakil organisasi Islam dan sebagian besar pengurus Masyumi daerah Priangan, para utusan dari Ciamis, Tasikmalaya, Garut, Bandung dan Sumedang. Diantara mereka yang hadir antara lain Kartosuwiryo sebagai wakil pengurus besar Masyumi untuk Jawa Barat, Kamran sebagai komandan teritorial sabilillah, Sanusi Partawidjaja sebagai ketua Masyumi daerah Priangan, Raden Oni sebagai pemimpin sabilillah daerah Priangan, Dahlan Lukman sebagai ketua GPII (Gerakan Pemuda Islam

Indonesia), Siti Murtaji'ah sebagai ketua Putri GPII, Abdullah Ridwan sebagai ketua hizbullah Priangan dan Saefullah sebagai ketua Masyumi cabang Garut, perwakilan dari Dewan atau Majelis Pertahanan Umat Islam Bandung dan Sumedang, masing-masing dua orang anggota, dan turut hadir pula perwakilan dari Dewan atau Majelis Pertahanan Umat Islam Tasikmalaya dan Ciamis, masing-masing 3 orang anggota (Holk Harald Dengel, 1995: 65-66).

Dalam konferensi di Cisayong dihasilkan suatu keputusan penting, salah satu diantaranya yaitu mengenai pembentukan pasukan TII. Keputusan lain mengenai pembentukan TII yaitu mengangkat Raden Oni sebagai pemimpin TII untuk daerah Priangan dan memberikan kekuasaan kepadanya untuk menyusun TII dalam waktu 3 bulan (Pinardi, 1964: 57). Penduduk diperintahkan untuk menyerahkan seluruh senjata yang mereka miliki kepada TII dan harus mengumpulkan uang untuk membeli senjata. Salah satu pedoman yang dipakai untuk mengumpulkan senjata tersebut ialah setiap desa diwajibkan untuk mengumpulkan sedikitnya 10 pucuk senjata (Pinardi, 1964: 57). Selain itu apabila ada kesatuan militer yang tidak mau menyerahkan senjatanya secara sukarela, maka mereka ini akan dilucuti secara paksa oleh TII.

3. Sekilas Perkembangan TII

Pada tanggal 15 Februari 1948 diadakan suatu pertemuan khusus untuk melanjutkan perundingan mengenai pembentukan TII. Pertemuan ini bertujuan untuk memberikan bentuk yang lebih konkret kepada TII. Dalam pertemuan tersebut Raden Oni diangkat menjadi Komandan Resimen TII. Selanjutnya Raden Oni memberikan nama resimennya ini dengan nama Resimen Sunan Rakhmat. Resimen Sunan Rakhmat terdiri dari empat batalyon, yaitu Batalyon I dikuasakan kepada S. Otong dari Bandung, Batalyon II dikuasakan kepada Haji Zainal Abidin dari Limbangan, Batalyon III dikuasakan kepada M. Nur Lubis dari Sumatera Barat dan Batalyon IV diserahkan kepada Adah Djaelani dari Singaparna (Holk Harald Dengel, 1995: 67). Raden Oni menempatkan batalyon-batalyon resimennya ini di Gunung Cupu di daerah Gunung Mandaladatar.

Pada 1-2 Maret 1948 diadakan konferensi di Cipendeuy, Kecamatan Bantarujeg, Cirebon. Konferensi dihadiri oleh tokoh-tokoh utama DI/TII, seperti Kartosuwiryo, Kamran, Raden Oni, Ghozali Tusi, Sanusi Partawidjaja, dan Toha Arsyad. Konferensi juga dihadiri oleh semua pimpinan cabang-cabang Masyumi daerah Jawa Barat seperti dari Banten, Jakarta, Bogor, Priangan, Cirebon dan

juga para komandan TII (Holk Harald Dengel, 1995: 68). Konferensi yang berlangsung di Cirebon ini bertujuan untuk meninjau dan merumuskan keputusan-keputusan konferensi di Cisayong. Salah satu rencana yang disahkan dalam konferensi ini ialah mengenai peleburan pasukan Hizbullah dan Sabilillah menjadi TII dan pembentukan Divisi TII. Keputusan berikutnya adalah Hizbullah Cirebon dilebur menjadi TII dan Kamran diangkat sebagai Panglima Divisi TII.

Pada tanggal 1-5 Mei 1948 diadakan konferensi yang ketiga di Cijoho, Kecamatan Bantarujeg, Cirebon. Dalam konferensi itu Kartosuwiryo telah berhasil menyusun susunan ketentaraan NII, yakni TII. Susunan ketentaraan tersebut adalah sebagai berikut (Disjarah kodam VI Siliwangi, 1979: 471).

1. Kamran diangkat menjadi Panglima Divisi Syarif Hidayat.
2. Ibnu Khotieq diangkat menjadi Kepala Staf ketentaraan.
3. Urusan Umum ketentaraan dijabat oleh Danu Mohammad Hasan.
4. Raden Oni diangkat menjadi komandan Resimen Sunan Rakhmat.
5. M. Nur Lubis diangkat sebagai komandan Batalyon Kholid bin Walid.

Pada tanggal 15 Januari 1950, pihak NII telah mengubah dan menyempurnakan angkatan perang TII. Sejak waktu itu susunan angkatan perang TII ialah sebagai berikut (Disjarah TNI AD, 1985: 111-112).

1. Daerah Jawa Barat berada dibawah Divisi I Sunan Rakhmat, dengan panglimanya Raden Oni.
2. Daerah Jawa Tengah berada dibawah Divisi II Syarif Hidayat dengan panglimanya Kamran.
3. Divisi I Sunan Rakhmat mempunyai kekuatan 3 Resimen yaitu:
 - a. Resimen II Sapujagat dibawah pimpinan Haji Zaenal Abidin.
 - b. Resimen IV Kholid bin Walid pimpinan Adah Jaelani.
 - c. Resimen XII SJF dibawah pimpinan Agus Abdullah.

III. Organisasi Militer dan Siasat Gerilya Tentara Islam Indonesia (TII)

A. Organisasi Militer TII

Secara garis besar susunan organisasi militer TII tersusun dari satuan tingkat regu sampai pada satuan tingkat divisi (Al-Chaidar, 1999: 616). Pimpinan tertinggi dipegang oleh Kartosuwiryo, yakni sebagai seorang Panglima Tertinggi TII. Pada satuan tingkat divisi, TII dipimpin oleh seorang Panglima Divisi yang berasal dari golongan perwira tinggi dengan pangkat letnan kolonel tingkat I sampai dengan

kolonel tingkat I (Al-Chaidar, 1999: 587). Dibawah satuan tingkat divisi, terdapat satuan tentara yang dinamakan resimen, yang dipimpin oleh seorang Komandan Resimen dengan pangkat mayor tingkat II sampai dengan letnan kolonel tingkat II. Dibawah satuan tingkat resimen terdapat satuan tingkat batalyon yang dipimpin oleh seorang Komandan Batalyon dengan pangkat kapten tingkat III sampai dengan mayor tingkat III. Selanjutnya pada satuan tingkat batalyon terdapat satuan tentara yang dinamakan kompi yang dipimpin oleh seorang Komandan Kompi. Komandan Kompi ini berpangkat letnan II tingkat II sampai dengan letnan I tingkat I (Al-Chaidar, 1999: 587). Pada satuan tingkat kompi terdapat satuan tingkat peleton yang dipimpin oleh seorang Komandan Peleton dengan pangkat sersan mayor tingkat III sampai dengan letnan II tingkat III. Dibawah satuan tingkat peleton masih terdapat satuan tentara yang bernama regu, dimana tiap satuan tingkat regu ini dipimpin oleh seorang Komandan Regu dengan pangkat koprал sampai dengan sersan I.

Pada tiap divisi TII terdapat empat resimen. Tiap-tiap resimen TII membawahi empat kekuatan batalyon. Sementara pada masing-masing batalyon berkekuatan empat kompi. Tiap satuan kompi TII terdapat empat peleton dan pada tiap-tiap peleton terdapat empat regu, serta pada tiap-tiap regu terdapat sebelas personel atau prajurit TII.

B. Siasat Gerilya TII

Untuk dapat memelihara jiwa ketenteraan NII maka telah diatur supaya TII tidak terlalu lama tinggal di suatu kampung atau desa. Durasi menetap TII di satu tempat bergantung pada potensi ancaman. Di daerah yang tidak aman mereka hanya tinggal dua malam, tetapi apabila tempat tersebut dirasa aman mereka bertahan hingga satu tahun lamanya (Nugroho Dewanto, 2011: 58). Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga semangat juang TII. TII juga tidak boleh terlalu lama tinggal di gunung-gunung atau di hutan-hutan. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar TII tetap cekatan dalam melakukan gerakannya. Dengan demikian itu TII dapat ditempatkan di kampung atau desa dan dapat pula ditempatkan di hutan-hutan. Artinya yakni apabila TNI sedang beroperasi di kampung atau desa, TII bersembunyi di hutan-hutan. Namun apabila TNI telah usai masa operasinya maka TII masuk ke kampung atau desa dengan memanfaatkan rumah-rumah penduduk sebagai tempat persembunyian (Irfan S. Awwas, 2008: 226).

Gerakan cepat dapat dilakukan oleh TII dalam jumlah besar maupun kecil dan harus diusahakan dengan serba cepat untuk dapat meghindar dari bahaya. Hal ini

dilakukan karena alat-alat perhubungan TII seperti alat-alat transportasi belum memadai. Dengan demikian perlu adanya gerakan pasukan yang dilakukan dengan gerakan cepat sehingga pasukan yang jumlahnya besar maupun kecil dapat mengalahkan musuh yang kekuatannya jauh lebih besar.

Dalam menghadapi musuh yang jumlahnya kecil, taktik diatur dengan membentuk huruf C. Musuh dipaksa untuk menyerah, akan tetapi apabila musuh tetap tidak mau menyerah maka empat atau lima orang anggota TII yang terpilih ditugaskan untuk menyergap musuh. Sementara anggota TII yang lain tetap siaga untuk menjaga dan menghadang agar musuh tidak dapat meloloskan diri. Namun apabila menghadapi musuh dalam jumlah dan kekuatan yang seimbang maka akan diberi kelonggaran jalan bagi musuh agar musuh tersebut melarikan diri.

Dalam menghadapi pertempuran jarak dekat, TII diatur dengan cara merayap. Pasukan dilarang menembak sebelum jarak tembak dekat. Dengan demikian itu maka akan ada kemungkinan dapat merampas perlengkapan perang dari pihak musuh. Namun apabila terjadi blokade dari pihak musuh maka TII harus mempergunakan taktik untuk menembus blokade musuh dengan cara (Disjarah TNI AD, 1985: 104).

1. Berpindah tempat pada waktu malam hari ke daerah yang dianggap penting dan aman.
2. Seluruh kekuatan pasukan yang telah diblokade oleh pihak musuh dipersatukan di waktu malam hari, kemudian membulatkan tekad bersama untuk menembus markas musuh satu persatu. Dalam menembus blokade musuh tersebut harus memperhatikan kelengahan musuh, misalnya pada waktu makan, waktu mandi, waktu tidur. Namun apabila keadaan memungkinkan, pasukan dianjurkan untuk menyerang musuh pada waktu malam hari.
3. Upayakan meloloskan diri dari blokade musuh dengan pasukan-pasukan kecil, paling banyak satu regu dan dilakukan pada malam hari.
4. Apabila usaha-usaha di atas tidak mungkin dapat dikerjakan maka pasukan dianjurkan agar mencari jalan satu jurusan untuk dapat menerobos blokade musuh.
5. Usahakan memotong blokade musuh dengan cara mengadakan serangan bersama menggunakan taktik gerilya dengan jumlah pasukan kecil, asalkan blokade musuh dapat ditembus sedangkan pasukan dapat diselamatkan.

6. Cara terakhir untuk menghindarkan diri dari blokade musuh yaitu dengan jalan mengambil suatu tekad, dengan mengikhhlaskan diri kepada Allah untuk mati syahid. Cara ini dilakukan oleh tiap-tiap anggota pasukan dengan menggunakan peralatan senjata yang dimilikinya.

IV. Perekrutan anggota, Persenjataan dan Komando Perang TII

A. Perekrutan Anggota TII

Bergabungnya Pasukan Hizbullah dan Sabilillah ke dalam TII masih dirasa kurang oleh NII. Hal ini mendorong NII untuk berusaha mengembangkan dan mencari tambahan kekuatan tempur TII, yakni dengan jalan melakukan kerjasama dengan Belanda. NII mendapat tambahan kekuatan berupa tenaga manusia dari pihak militer Belanda. Bantuan yang secara khusus memberikan tambahan kekuatan kepada TII ini diantaranya yaitu bekas anggota KNIL, Polisi Belanda dan Polisi Perkebunan, terutama mereka yang pernah ikut dalam gerakan yang menamakan dirinya APRA (Angkatan Perang Ratu Andil) di bawah pimpinan Westerling.

Untuk dapat menambah anggota dan mengembangkan potensi militer TII maka pihak NII kemudian menerapkan Sistem Wadah. Dalam prakteknya seseorang komandan pasukan kecil, misalnya Komandan Kompi dipandang oleh atasannya cakap, maka ia pun diangkat menjadi Komandan Batalyon, dengan catatan bahwa jumlah pasukannya tidak ditambah, akan tetapi daerah kekuasaannya sebagai Komandan Batalyon yang baru itu diperbesar disesuaikan dengan kedudukannya sebagai seorang Komandan Batalyon. Oleh karena Komandan Batalyon yang baru tersebut merasaempuyai tanggungjawab dalam lingkungan wilayah yang lebih luas, maka ia diharuskan untuk memperlengkapi dan menambah jumlah pasukannya untuk disesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya dan disesuaikan dengan kebutuhan kekuatan dari suatu batalyon. Dengan demikian pimpinan atasan tidak hanya mengangkatnya sebagai Komandan Batalyon, melainkan juga memberikan wadah kepada Komandan Batalyon yang baru itu untuk diisi sebaik-baiknya.

NII kemudian berusaha menambah kekuatan tempur TII dengan jalan menarik pemuda-pemuda desa di daerah-daerah yang dikuasai dengan berbagai akal dan muslihat maupun dengan cara penculikan atau paksaan. Pihak NII menggunakan berbagai propaganda yang didalamnya mengandung unsur-unsur agama dan mistis untuk dapat menarik simpati rakyat agar mau bergabung menjadi anggota TII.

TII masuk ke rumah-rumah penduduk di perkampungan Jawa Barat untuk merekrut anggota. Dalam merekrut anggotanya dikalangan rakyat biasa, TII

biasanya melakukan penculikan-penculikan dengan cara paksaan. Aksi tersebut dilakukan terutama di daerah perkampungan yang letaknya jauh dari penjagaan pos-pos militer TNI atau perkampungan terpencil. Penduduk laki-laki diculik dan dipaksa untuk bergabung dengan TII. Diantara penduduk laki-laki yang dipaksa untuk bergabung dengan TII ini banyak terdapat anak-anak yang masih berumur belasan tahun. Namun ada juga penduduk yang secara sukarela atau atas kemauan sendiri menyatakan diri untuk menjadi anggota TII. Mereka ini umumnya merupakan orang-orang yang sengaja melarikan diri dari hukum setelah melakukan suatu tindakan kejahatan (Pinardi, 1964: 158).

B. Persenjataan TII

Secara garis besar senjata-senjata TII menurut sumbernya dapat dibagi menjadi tiga yaitu (Pinardi, 1964: 98-99).

1. Senjata-senjata buatan Jepang. Senjata tersebut berasal dari bekas barisan-barisan perjuangan ataupun Tentara Jepang yang melarikan diri dan masuk menjadi anggota TII.
2. Senjata-senjata bekas milik Tentara Belanda.
3. Senjata-senjata buatan sendiri yang masih sangat sederhana.

Senjata buatan Jepang, misalnya senjata jenis pistol dimiliki oleh bekas Pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang menggabungkan diri dengan TII. Bekas Pasukan Hizbullah dan Sabilillah kebanyakan mendapatkan senjata ini dari hasil rampasan Tentara Jepang. Sementara senjata bekas milik Tentara Belanda seperti senjata jenis bren diperoleh dari bekas Pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta bekas anggota APRA, KNIL yang menggabungkan diri dengan TII. Senjata bekas milik Tentara Belanda juga diperoleh dari hasil rampasan perang pada waktu TII melakukan pertempuran melawan TNI. Sedangkan persenjataan buatan sendiri yang masih sederhana misalnya seperti bedok, kelewang dan bambu runcing diperoleh dari penduduk yang dengan terpaksa maupun secara sukarela ikut bergabung dengan TII.

C. Komando Perang TII

Untuk menjamin berlakunya hukum perang, seluruh Indonesia oleh Kartosuwiryo dibagi menjadi tujuh Daerah Perang atau Sapta Palagan (Al-Chaidar, 1999: 624). Tujuh Daerah Perang itu meliputi daerah sebagai berikut.

1. Daerah Perang Pertama

Daerahnya meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan nama Komando Perang Seluruh Indonesia (KPSI) yang dipimpin langsung oleh Panglima Tertinggi APNII.

2. Daerah Perang Kedua

Daerahnya meliputi beberapa wilayah dalam NII dengan nama Komando Perang wilayah Besar (KPWB). Untuk seluruh wilayah Indonesia ditetapkan tiga KPWB dan masing-masing KPWB dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPWB. Tiga KPWB itu adalah sebagai berikut (Holk Harald Dengel, 1995: 135).

- a. KPWB I, terdiri atas Pulau Jawa dan Madura yang dipimpin oleh Agus Abdullah.
- b. KPWB II, terdiri atas seluruh wilayah Indonesia Timur (Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, Irian Barat, dan Kalimantan) yang dipimpin oleh Kahar Muzakkar.
- c. KPWB III, terdiri atas seluruh Sumatera dan kepulauan sekitarnya yang dipimpin oleh Daud Beureueh.

3. Daerah Perang Ketiga

Daerahnya hanya meliputi satu wilayah NII dengan nama Komando Perang Wilayah (KPW). Setiap KPW dipimpin oleh seorang Panglima Perang KPW, yang diangkat oleh Imam NII. Dengan demikian beberapa KPW merupakan satu KPWB. Seluruh Indonesia terdapat tujuh KPW yakni (Holk Harald Dengel, 1995: 135-136).

- a. KPW I, terdiri dari daerah Karesidenan Jakarta, Purwakarta, Cirebon dan Priangan Timur.
- b. KPW II, terdiri dari Jawa Tengah. Namun wilayah ini dihapus karena gerakan Darul Islam yang dipimpin oleh Amir Fatah telah lama gagal.
- c. KPW III, direncanakan di daerah Jawa Timur dibawah pimpinan Masduki.
- d. KPW IV, terdiri dari Sulawesi Selatan dan daerah sekitarnya dibawah pimpinan Kahar Muzakkar.
- e. KPW V, terdiri dari wilayah Pulau Sumatera dibawah pimpinan Daud Beureueh.
- f. KPW VI, direncanakan di daerah Kalimantan dibawah pimpinan Ibnu Hajar, tetapi gagal.

- g. KPW VII, terdiri dari Karesidenan Bogor, Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang dan Karesidenan Banten dibawah pimpinan Ateng Djaelani Setiawan.
4. Daerah Perang Keempat

Daerahnya meliputi satu wilayah Karesidenan NII dengan nama Komando Perang Setempat atau KOMPAS. Setiap KOMPAS dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran KOMPAS, yang diangkat oleh Panglima Perang KPW atas nama Imam NII.
5. Daerah Perang Kelima

Daerahnya meliputi satu wilayah Kabupaten NII dengan nama Sub Komando Perang Setempat atau Sub-KOMPAS. Setiap Sub-KOMPAS dipimpin oleh Komandan Pertempuran Sub-KOMPAS, diangkat oleh Panglima Perang KPW, atas nama Imam NII.
6. Daerah Perang Keenam

Daerahnya meliputi satu wilayah Kecamatan NII atau lebih dengan nama Sektor. Setiap Sektor dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sektor, yang diangkat oleh Komandan Pertempuran KOMPAS yang bersangkutan atas nama Imam NII.
7. Daerah Perang Ketujuh

Daerahnya meliputi satu desa atau lebih dengan nama Sub-Sektor, dipimpin oleh seorang Komandan Pertempuran Sub-Sektor (Disjarah TNI AD, 1985: 128). Setiap Komandan Pertempuran Sub-Sektor diangkat oleh Komandan Pertempuran Sub-KOMPAS atas nama Imam NII.

V. Berakhirnya TII Pada Masa Kartosuwiryo

A. Akhir Gerilya TII di Jawa Barat

Pada awal tahun 1950 sampai 1952, TNI selalu aktif melakukan operasi penumpasan, baik terhadap NII maupun terhadap TII pada khususnya. Namun sampai tahun 1957, pelaksanaan operasi penumpasan terhadap TII belum dapat berjalan dengan sempurna. Hal ini terutama karena belum adanya sifat mobilitas dari pasukan TNI. Gerakan operasi yang dilakukan TNI masih bersifat pasif-defensif, yakni masih menggunakan pos-pos penjagaan yang sifatnya menetap. Selain itu kemampuan teknis pasukan TNI masih terbatas karena belum adanya suatu taktik perang anti gerilya, sehingga TII dapat menguasai situasi. Akibatnya sebagian rakyat

banyak yang memihak kepada TII karena adanya hubungan keluarga dan fanatik keagamaan.

Tahun 1958 merupakan tahun kebangkitan kearah pemikiran siasat untuk memulihkan keamanan, terutama untuk daerah Jawa Barat. Hasilnya yaitu mengenai konsepsi perang wilayah. Konsepsi ini merupakan manifestasi dari Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat 1 yang menjelaskan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam pembelaan negara (Disjarah Kodam VI Siliwangi, 1979: 306). Dasar pemikiran konsep perang wilayah itu yakni bahwa tanpa adanya bantuan aktif dari rakyat, pemberontakan DI/TII tidak akan dapat ditumpas. Untuk itu keadaan masyarakat harus distabilisasikan dengan cara berfikir yang konstruktif dan integrasi nasional perlu didukung untuk mencapai partisipasi yang aktif dari rakyat dalam tugas-tugas pertahanan.

Dalam pelaksanaan operasi dilakukan sistem isolasi total. Untuk melaksanakan sistem isolasi total ini dibutuhkan partisipasi aktif rakyat. Untuk itu sejak awal operasi digelar dikeluarkanlah instruksi untuk setiap anggota TNI agar tidak menyinggung hati rakyat setempat, terutama sama sekali tidak diperkenankan menimbulkan kerugian pada rakyat. Masing-masing komandan militer mengunjungi secara teratur para alim ulama di wilayah Jawa Barat dalam rangka mempererat hubungan dan menciptakan rasa saling pengertian. Dengan adanya tindakan positif dan disiplin anggota TNI terhadap peraturan-peraturan yang telah digariskan dalam pelaksanaan operasi tersebut maka TNI berhasil menguasai rakyat dan pada akhirnya rakyat memihak kepada TNI.

Operasi penumpasan dimulai dari daerah Banten. Hal ini dimaksudkan untuk mencegah adanya kemungkinan pasukan TII menyeberang ke Sumatera. Pelaksanaan operasi untuk daerah Banten dipimpin oleh Mayor Sudarman Banuali. Kabupaten lebak ditetapkan sebagai Daerah Operasi C 19. Oleh karena itu di daerah ini dilakukan isolasi total yang diselenggarakan menurut bentuk taktik Pagar Betis. Tugas selanjutnya diteruskan untuk mengadakan operasi di daerah kompleks Gunung Aseupan, yang merupakan Daerah Operasi C 18. Dalam pelaksanaannya dikerjakan secara lebih efektif sehingga dalam waktu enam bulan satuan-satuan TII di daerah Banten telah berhasil dibersihkan.

Praktek Pagar Betis yang diterapkan dalam usaha pengisolasian gerakan DI/TII bertujuan untuk mendesak TII ke suatu daerah tertentu. Setelah kesatuan TII terdesak ke suatu daerah tertentu, maka daerah tersebut kemudian dilingkari dengan

garis pertahanan Pagar Betis. Setiap 5 meter terdapat satu saung pos rakyat yang terdiri dari 5 orang yang tidak bersenjata. Pada setiap 5 sampai 10 saung pos rakyat atau setiap 20-40 meter, terdapat satu pos militer yang berkekuatan 3 pucuk senjata. Antara satu saung dengan saung yang lainnya, dipasang rintangan berupa tali yang digantungi dengan kaleng-kaleng kosong yang diisi dengan sejumlah bebatuan dan dipasang setinggi betis. Dengan ini akan timbul bunyi manakala tali itu tersentuh. Selain itu dipasang lagi satu tali setinggi pinggang yang dimaksudkan sebagai alarm yang ditarik pada saat terdapat bahaya menurut kode-kode tarikan yang sebelumnya telah ditetapkan (Holk Harald Dengel, 1995: 187). Saung-saung pos rakyat tersebut diamankan oleh sejumlah satuan tempur yang terus menerus bergerak dalam rangka mencari kontak dengan lawan yang bertujuan untuk menghancurkannya (Lia Rohmawati, 2004: 66).

Gerakan operasi selanjutnya diteruskan di daerah Bogor yang terdiri dari tiga Daerah Operasi C yaitu 14, 15 dan 17. Gerakan operasi di daerah Bogor ini menggunakan operasi yang bersifat terbuka. Pimpinan operasi sering menggunakan rapat dengan para pejabat pemerintah, rakyat setempat, tokoh-tokoh alim ulama serta pejabat-pejabat yang mempunyai pengaruh. Gerakan isolasi total di daerah Bogor ini berkembang lebih lanjut dengan mendapat penyempurnaan dalam pelaksanaannya. Teknik Pagar Betis di daerah Banten lebih dikembangkan lagi dalam gerakan operasi di daerah Bogor. Sistem Pagar Betis ini pada dasarnya merupakan suatu bentuk pengerahan daya mampu wilayah yang inti pokoknya terletak didalam pembinaan wilayah.

Isolasi total yang telah berhasil diterapkan dalam operasi di daerah Banten dan Bogor, juga diterapkan dalam operasi di daerah komplek Gunung Burangrang dan Gunung Tangkuban Perahu. Operasi di daerah Bandung ini ternyata berhasil dengan baik. Dari hasil operasi itu, Komando Daerah Militer VI Siliwangi lebih yakin akan manfaat operasi yang dijalankan dengan menggunakan isolasi total.

Gerakan selanjutnya diteruskan ke arah timur daerah Ciwidey yang termasuk ke dalam Daerah Operasi C 14. Di daerah ini terdapat satuan TII di bawah pimpinan Toha Mahfud. Setelah melakukan gerakan operasi di daerah Ciwidey ini, Divisi Siliwangi berhenti di daerah Pacet, Bandung Selatan, untuk menahan supaya TII tidak kembali ke arah Barat. Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan R. O. 2. 1. 2 yang dipercepat dalam R. O. 2. 1. 2. 1, maka dikeluarkan tiga perintah operasi, yaitu (Disjarah TNI AD, 1985: 136).

1. PO Cepat I-XII, dalam jangka waktu antara 1 Januari 1961-31 Januari 1962.
2. PO Brata Yudha I-IV, jangka waktu Maret 1962-Juni 1962.
3. PO Pamungkas I-IV, jangka waktu Agustus 1962-Januari 1963.

Percepatan pemulihan keamanan di Jawa Barat telah digariskan oleh pemerintah bahwa daerah Jawa Barat harus sudah tercapai seluruhnya pada akhir tahun 1962. Untuk melaksanakan hal tersebut maka Kodam VI Siliwangi mengadakan suatu operasi penentuan yang terakhir. Operasi tersebut diberi nama Operasi Brata Yudha yang mulai dilaksanakan sejak bulan April 1962. Dalam pelaksanaannya, Kodam VI Siliwangi dibantu oleh Kodam VII Diponegoro dari Jawa Tengah dan Kodam VIII Brawijaya dari Jawa Timur. Pelaksanaan operasi Brata Yudha ini dibagi dalam beberapa daerah pertempuran yaitu (Disjarah TNI AD, 1985: 137).

- a. Kuru Setra I, DO C5, meliputi kompleks Gunung Galunggung.
- b. Kuru Setra II, DO C8 dan 9, meliputi daerah Gunung Guntur.
- c. Kuru Setra III, DO C6, meliputi daerah Rangas dan Maroco.
- d. Kuru Setra IV, DO C12, meliputi kompleks Cimareme.

Pada awal Mei tahun 1962, pemimpin TII yang telah menyerah yakni Toha Mahfud, menyerukan kepada Kartosuwiryo, Agus Abdullah dan Adah Djaelani Tirtapradja untuk menghentikan perlawanan. Akhirnya pada akhir bulan itu juga, karena keadaan yang sudah tak dapat diperbaiki lagi tingkat keparahannya, Adah Djaelani Tirtapradja meletakkan senjata. Dengan menyerahnya Adah Djaelani Tirtapradja, tokoh penggerak utama TII tinggallah Agus Abdullah dan Kartosuwiryo beserta pengawalnya yang bernama Aceng Kurnia.

Gerakan operasi selanjutnya ditujukan untuk mencari tempat persembunyian pemimpin pemberontakan DI/TII yaitu Kartosuwiryo. Mulai tanggal 3 Juni 1962, kesatuan-kesatuan Batalyon 328 Kujang II Siliwangi dikerahkan di daerah-daerah operasi untuk mencari jejak TII. Dalam melaksanakan tugas operasi ini, kesatuan militer masih tetap mengikutsertakan seluruh rakyat untuk melaksanakan tugas Pagar Betis. Akhirnya Peleton II dibawah pimpinan Letnan Dua Suhandi dari kompi C Batalyon 328 Kujang II, telah berhasil melakukan pengepungan di daerah Gunung Geber, Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962. Dalam pengepungan tersebut ditemukan gubuk-gubuk persembunyian TII yang didalamnya terdapat Kartosuwiryo, beserta

putra dan juga pengawalnya yakni Mohammad Darda dan Aceng Kurnia. Di daerah Gunung Geber ini akhirnya mereka menyerah.

Tertangkapnya Kartosuwiryo dan sebagian besar pasukannya di daerah Gunung Geber tidak berarti keamanan di Jawa Barat telah pulih kembali. Beberapa anggota TII masih berkeliaran di hutan-hutan. Diantara anggota TII yang masih berada di hutan yaitu Agus Abdullah (Panglima KPWB 1/Jawa dan Madura) dan juga komandan pengawalnya yang bernama H. Syarif alias Ghozin (Irfan S. Awwas, 2008: 267-268). Untuk mengajak pasukannya yang masih berkeliaran itu maka Mohammad Darda mengeluarkan suatu pengumuman yang ditujukan kepada seluruh anggota TII pada tanggal 6 Juni 1962. Seruan tersebut ditandatangani oleh Mohammad Darda. Ditentukan pula bahwa setiap anggota TII harus mendatangi pos-pos TNI terdekat. Sesudah dikeluarkannya seruan ini, sebagian besar anggota TII menyatakan kembali ke pangkuan RI. Akhirnya Agus Abdullah dan H. Syarif alias Ghozin pun mematuhi seruan Mohammad Darda dan kemudian mereka berdua dijemput dengan sebuah helikopter di Gunung Ceremai (Majalengka) pada tanggal 1 Agustus 1962 (Irfan S. Awwas, 2008: 268).

Panglima Kodam VI Siliwangi, Kolonel Ibrahim Adji selaku komandan langsung yang memimpin Operasi Brata Yudha, menyerukan kepada setiap anggota TII yang masih berada di hutan agar segera turun gunung dan menghentikan setiap kegiatannya serta menyerahkan diri dengan membawa semua senjata dan alat perlengkapan lainnya demi keselamatan mereka dimasa kini dan dimasa yang akan datang. Selain itu ia juga telah memerintahkan agar pos-pos TNI menerima anggota TII yang turun dari persembunyiannya di hutan-hutan. Diantara anggota-anggota TII yang turut menyerahkan diri ini terdapat sejumlah remaja berusia 10 sampai 12 tahun dengan seragam lengkap TII dengan membawa senjata mereka (Holk Harald Dengel, 1995: 195).

Setelah Operasi Brata Yudha dilaksanakan seluruhnya dalam bulan September 1962, yang berarti tiga bulan lebih cepat dari rencana awal, masih dilaksanakan operasi lanjutan yaitu Operasi Pamungkas. Operasi pamungkas ini bertujuan untuk membersihkan sisa-sisa TII di seluruh wilayah Jawa Barat.

B. Dampak Adanya Kegiatan TII di Jawa Barat

Mulai tahun 1950, TII menyerang desa-desa dan kota-kota yang berada di bawah lindungan pemerintah RI. Kesatuan-kesatuan TII masuk ke desa-desa untuk menagih pajak yang disebut Infaq dari rakyat. Pada awal gerakan Darul Islam setiap

orang yang membayar pajaknya masih diberikan bukti penerimaan yang dinamakan uang Infaq. Namun ketika semakin banyaknya rakyat di pedesaan tidak lagi sanggup menyerahkan sejumlah uang yang diminta, TII langsung masuk ke rumah-rumah penduduk dan secara paksa mengambil apa yang mereka butuhkan. Pada waktu itu TII juga masuk ke kota-kota besar dan menduduki kota-kota tersebut selama beberapa jam. Kemudian TII melakukan perampokan harta benda penduduk kota-kota tersebut. Diantara kota-kota yang menjadi sasaran TII ialah di daerah Priangan Timur seperti Tasikmalaya, Garut, dan Majalengka.

Pada tahun 1951, jalur transportasi di Jawa Barat semakin tidak aman. Kendaraan-kendaraan pada siang hari dari satu kota ke kota lainnya hanya dapat bergerak dalam konvoi karena takut akan dicegat oleh TII. Pada malam hari umumnya lalu lintas berhenti total, seperti jalur lalu lintas Bandung-Jakarta dan ke jurusan Serang. Semua kendaraan sesudah pukul 16.00 meninggalkan jalan-jalan tersebut dan memasuki kota-kota besar karena setelah itu kawasan ini dikontrol oleh TII. Beberapa angkutan truk, angkutan umum seperti bus dan taksi beserta penumpang-penumpangannya serta rakyat biasa dan bahkan anggota-anggota TNI beserta kendaraannya, dihadang, ditembaki, dibakar dan paling tidak harta benda mereka dirampas oleh TII (Amak Sjariffudin, 1962: 18). Pada awal tahun 1952, pencegahan terhadap kereta api juga semakin meningkat. Mula-mula kereta api dihentikan dengan cara menanam tiang dengan bendera perang NII di tengah rel, akan tetapi pada akhir tahun ini kereta api dianjlokkan begitu saja.

Memasuki tahun 1953, situasi di bidang militer mulai banyak menguntungkan Gerakan Darul Islam. Pada waktu itu setiap terjadi pertempuran antara TNI dengan TII, rata-rata setiap hari ada seorang korban tewas di pihak TNI. Pada tahun tersebut kerusakan yang harus ditanggung oleh pemerintah RI diperkirakan sebesar Rp. 115.000 setiap harinya. Bahkan pada tahun 1954, kerugian akibat serangan-serangan yang dilakukan oleh TII semakin meningkat menjadi dua kali lipat hingga mencapai Rp. 82 juta (Holk Harald Dengel, 1995: 146).

Penyerangan TII terhadap desa-desa dan kota-kota di Jawa Barat semakin meningkat pada tahun 1956. Pada bulan September, hanya dalam waktu 17 hari telah dibakar 254 rumah, 2 masjid dan sebuah sekolah di Tasikmalaya, dan pada bulan November sebuah kesatuan TII yang terdiri dari 320 tentara membakar lebih dari 100 buah rumah di daerah Tarayu, serta di wilayah Priangan Timur dalam waktu seminggu dibunuh 20 orang penduduk sipil, 3 orang diculik dan 373 rumah

dibakar yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 2 Juta ((Holk Harald Dengel, 1995: 152-153).

Aksi teror TII terhadap rakyat Jawa Barat berlangsung terus. Sekitar awal tahun 1957 TII melakukan perampokan di desa Pacet, Bandung Selatan. Dalam aksinya yang berlangsung selama satu malam itu TII telah berhasil membunuh 2 orang penduduk sipil dan 5 rumah penduduk dibakar serta merampas sejumlah hasil pertanian seperti kentang, beras dan padi (Pinardi, 1964: 173).

Kerusuhan di Jawa Barat yang disebabkan oleh TII sebagai tulang punggung utama gerakan Darul Islam telah berlangsung lama hingga tahun 1962. Hal ini mengakibatkan kerusakan berat pada pembangunan di Jawa Barat. Produksi pertanian menurun tajam, penduduk desa banyak yang mengungsi ke kota-kota sehingga terjadi kepadatan penduduk di daerah kota dan infrastruktur di daerah pedalaman mengalami kerusakan yang berat. Menurut pihak resmi hingga bulan Agustus 1962, kerugian material diperkirakan mencapai Rp. 650 juta dan jumlah korban penduduk terbunuh, luka dan yang diculik mencapai 22.895 jiwa (Holk Harald Dengel, 1995: 194).

VI. Kesimpulan

Kartosuwiryo bukanlah pribumi yang berasal dari Jawa Barat. Ia lahir di Cepu, Jawa Tengah dan berasal dari keluarga yang cukup mampu secara finansial. Ia merupakan salah satu tokoh yang cukup unik dalam sejarah nasional Indonesia. Ia pernah menjadi pejuang yang menentang segala bentuk kerjasama dengan penjajahan Belanda. Namun setelah masa kemerdekaan, Kartosuwiryo berbalik menyerang pemerintah RI dengan alasan kegagalan pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Puncaknya terjadi pada waktu hasil Perjanjian Renville harus dilaksanakan. Salah satu hasil perjanjian yang ditandatangani oleh Indonesia dan Belanda pada tanggal 17 Januari 1948 ini mengharuskan Divisi Siliwangi di Jawa Barat untuk hijrah ke daerah Jawa Tengah. Hal ini membuat Kartosuwiryo kecewa dan memutuskan untuk tetap bertahan di Jawa Barat bersama kedua pasukannya, yakni Hizbullah dan Sabilillah. Dengan hijrahnya Divisi Siliwangi maka di Jawa Barat terjadi kekosongan kekuasaan sehingga oleh Kartosuwiryo dijadikan sebagai momentum untuk merealisasikan cita-citanya mendirikan sebuah Negara Islam. Pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang tidak ikut hijrah ke Jawa Tengah telah dipengaruhinya dan kemudian kedua pasukan gerilya tersebut dijadikan sebagai kekuatan tentaranya yang diberi nama

TII, dimana dikemudian hari TII ini dijadikan sebagai alat negara bagi NII untuk melakukan aksi pemberontakan terhadap RI.

Pada tanggal 10-11 Februari 1948 di Desa Pangwedusan, Cisayong, Tasikmalaya, Kartosuwiryo beserta kawan seperjuangannya seperti Raden Oni dan Kamran mengadakan suatu konferensi yang telah berhasil membentuk TII. Pembentukan TII ini merupakan gabungan dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta semua organisasi Islam yang berada di Jawa Barat. Susunan TII secara lebih lengkap dilakukan pada tanggal 15 Februari 1948. Dalam pertemuan itu Raden Oni diangkat menjadi Komandan Resimen TII dan memberikan nama resimennya ini dengan nama Resimen Sunan Rakhmat. Kemudian untuk memperkuat kekuatan pasukan TII, pihak DI/TII mengadakan serangkaian konferensi lagi hingga akhirnya TII berhasil dibentuk sampai pada satuan tingkat divisi. Divisi TII ini diberi nama divisi Syarif Hidayat dengan Kamran diangkat sebagai panglimanya.

Organisasi militer TII yang dibentuk oleh Kartosuwiryo tersusun dalam bentuk satuan-satuan militer, mulai dari satuan tingkat divisi, resimen, batalyon, kompi, peleton sampai pada satuan tingkat regu. Pada tiap regu terdapat sebelas personel atau prajurit. Pimpinan tertinggi dipegang oleh Kartosuwiryo sebagai seorang Panglima Tertinggi TII. Sementara itu untuk dapat melaksanakan suatu perang gerilya maka telah disusun pokok-pokok siasat gerilya. Isi pokok siasat gerilya ini yaitu memuat beberapa cara dan sistem gerakan yang harus dikerjakan oleh setiap anggota TII. Beberapa cara dan sistem gerakan tersebut antara lain yaitu taktik timbul dan tenggelam, gerakan cepat, taktik menghadapi musuh, menembus blokade musuh dan gerakan bersama. Semua cara dan sistem gerakan tersebut telah disusun aturan-aturannya secara terperinci.

Perekrutan anggota TII diperoleh dari bekas anggota Pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta semua organisasi Islam yang berada di Jawa Barat, bekas tentara KNIL, Polisi Belanda, Polisi Perkebunan dan dari kalangan penduduk biasa. TII dalam merekrut anggota-anggotanya dari bekas Pasukan Hizbullah dan Sabilillah serta semua organisasi Islam di daerah Jawa Barat yang berada dalam pengaruh Kartosuwiryo dengan cara mempropagandakan anti RI dan menanamkan rasa bangga diri terhadap kekuatan sendiri. Kemudian TII juga melakukan kerjasama dengan pihak militer Belanda. Dalam kerjasama tersebut TII mendapat tambahan kekuatan berupa tenaga manusia dari pihak militer Belanda. Kekuatan yang memberikan bantuan kepada TII ini diantaranya yaitu bekas anggota KNIL, Polisi Belanda dan Polisi Perkebunan, terutama mereka yang pernah ikut dalam gerakan APRA. Dengan modal kekuatan riil tersebut di

atas maka NII kemudian menambah kekuatan tempur TII dengan jalan menarik pemuda-pemuda desa di daerah-daerah yang dikuasai dengan berbagai akal dan muslihat maupun dengan cara penculikan atau paksaan. Pihak NII menggunakan berbagai propaganda yang didalamnya mengandung unsur-unsur agama dan mistis untuk dapat menarik simpati rakyat agar mau bergabung menjadi anggota TII.

Modal persenjataan TII diperoleh terutama dari hasil rampasan perang pada waktu TII melakukan pertempuran-pertempuran melawan Tentara Jepang, Tentara Belanda maupun melawan TNI. Jenis-jenis senjata yang digunakan oleh TII diantaranya yaitu pistol, bren, watermantel, sten gun, owen gun, thomson dan mortir. Sementara untuk dapat menjamin berlakunya hukum perang maka pada tahun 1959 dibentuklah suatu komando perang, sehingga seluruh Indonesia dibagi menjadi tujuh Daerah Perang atau Sapta Palagan. Tiap-tiap daerah perang telah dibagi menurut luas wilayahnya dan pada tiap-tiap daerah perang tersebut dipimpin oleh seorang Komandan TII.

Tindakan yang dilakukan oleh Kartosuwiryo dengan pasukannya, yakni TII telah dianggap suatu bentuk pemberontakan terhadap RI. Oleh karena itu TNI melakukan tindakan untuk menumpasnya. Sistemnya antara lain dikenal dengan operasi Pagar Betis yang kemudian dilancarkan dengan operasi Brata Yudha. Dalam pelaksanaannya operasi penumpasan yang diberi nama operasi Brata Yudha ini Divisi Siliwangi dibantu oleh Divisi Diponegoro dan Divisi Brawijaya. Di lain pihak, TII berusaha untuk melakukan perlawanan. Namun usahanya mengalami kegagalan karena rakyat sudah tidak lagi mau membantu perjuangan mereka. Akibatnya TII kemudian melakukan tindakan-tindakan teror secara massal di daerah Jawa Barat. Dengan adanya operasi Pagar Betis yang dilanjutkan dengan operasi Brata Yudha ini pada akhirnya TII pimpinan Kartosuwiryo berhasil ditumpas oleh TNI pada tahun 1962.

Daftar Pustaka

Buku

- A. H. Nasution. (1984). *Pokok-pokok Gerilya: Dan Pertahanan Republik Indonesia di Masa yang Lalu dan yang Akan Datang*. Bandung: Angkasa.
- Al-Chaidar. (1999). *Pemikiran Politik Proklamator Negara Islam Indonesia S. M. Kartosoewirjo: Fakta dan Data Sejarah Darul Islam*. Jakarta: Darul Falah.
- Amak Sjariffudin. (1962). *Kisah Kartosuwirjo dan menjerahnja*. Surabaya: Grip.
- Daliman, A. (2006). *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Skripsi*. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi UNY.
- Deliar Noer. (1980). *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1990-1942*. Jakarta: LP3ES.
- _____. (1995). *Pengantar ke Pemikiran Politik*. Medan: Dwipa.

- Dengel, Holk Harald. (1995). “ Darul Islam: Kartosoewirjo Kompf Um Einen Islamischen Staat Indonesien”, ter. Tim Pustaka Sinar Harapan, *Darul islam dan kartosuwiryo: langkah perwujudan angan-angan yang gagal*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Dijk, Corneles van. (1983). “The Rellibion Under The Banner Of Islam” terj. Tim Grafiti Prees, *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta, Pustaka Utama Grafiti.
- Dinas Sejarah Kodam VI Siliwangi. (1979). *Siliwangi dari Masa ke Masa*. Bandung: Angkasa.
- Dinas Sejarah TNI AD. (1972). *Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI Angkatan Darat*. Bandung: Disjarah dan Fa Mahjuma.
- _____. (1985). *Penumpasan Pemberontakan DI/TII S. M. Kartosoewirjo di Jawa Barat*. Bandung: Dinas Sejarah TNI AD.
- Dudung Abdurrahman. (1999). *Metode Penelitian Sejarah*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Dwi Pratomo Yulianto. (2005). *Militer dan Kekuasaan: Puncak-Puncak Krisis Hubungan Sipil-Militer di Indonesia*. Yogyakarta: Narasi.
- Edi S. Ekajati. (1995). *Kebudayaan Sunda: Suatu Pendekatan Sejarah*. Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya.
- G. Moedjanto. (1992). *Indonesia Abad ke-2 bagian 2: dari Perang Kemerdekaan Pertama sampai Pelita III*. Yogyakarta: Kanisius.
- Gottschalk, Louis. (1975). “Understanding History: A Primer of Historical method”. a. b. Nugroho Notosusanto, *Mengerti Sejarah*. Jakarta: UI Press.
- H. J. Benda. (1980). *Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam di Indonesia Pada Masa Pendudukan Jepang*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hariyono. (1995). *Mempelajari Sejarah Secara Efektif*. Jakarta: Pustaka Jaya.
- Hassan Shadily. (1992). *Ensiklopedi Indonesia Edisi Khusus*, Jakarta: P.T. Ichtiar Baru.
- Helius Sjamsuddin dan Ismaun. (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud Dirjend Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Tenaga Akademik,
- Helius Sjamsuddin. (1996). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Depdikbud.
- _____. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Hugiono dkk. (1992). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- I Gde Widja. (1989). *Sejarah Lokal Suatu Perspektif dalam Pengajaran Sejarah*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Ida Anak Agung Gde Agung. (1991). *Renville*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Intermassa. (1992). *Profil Propinsi Republik Indonesia Jawa Barat*. Jakarta: Intermassa.
- Irfan S. Awwas. (2009). *Trilogi Kepemimpinan Negara Islam Indonesia: Menguak Perjuangan Umat Islam dan Pengkhianatan Kaum Nasionalis-Sekuler*. Yogyakarta: USWAH.
- Kevin Barnet. (1981). *Pengantar Teologi*. Jakarta: Gunung Mulia.
- Kuntowijoyo. (2001). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.

- Lorens Bagus. (1996). *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Nina H. Lubis. (1998). *Kehidupan Kaum Menak Priangan 1800-1942*. Bandung: Pusat Informasi Kebudayaan Sunda.
- Nugroho Dewanto. (2011). *Kartosuwirjo: Mimpi Negara Islam*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia).
- Nugroho Notosusanto. (1968). *Sedjarah dan Hankam*, Jakarta: Dephankam.
- _____. (1971). *Norma-norma Dasar Penelitian Penulisan Sejarah*. Jakarta: Departemen pertahanan dan Keamanan.
- Pinardi. (1964). *Sekarmaji Marijan Kartosuwiryo*. Jakarta: Arya Guna.
- Priyono. (2012). *Infanteri: The backbone of The Army*. Yogyakarta: Mata Padi Presindo.
- Ruslan, dkk. . (2008). *Mengapa Mereka Memberontak? Dedenglot Negara Islam Indonesia*. Yogyakarta: Bio Pustaka.
- Sartono Kartodirdjo. (1993). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Sidi Galzaba. (1966). *Pengantar Sejarah sebagai Ilmu untuk Tingkat Pengetahuan Menengah dan Perguruan Tinggi*. Jakarta: Bhratara.
- Sukarna. (1990). *Sistem Politik Indonesia Jilid I*. Bandung: Mandar Maju.
- Sutrisno Hadi. (1987). *Pengantar Metodologi Research I*. Yogyakarta: Yayasan Fakultas Psikologi UGM.
- Yahya A. Muhaimin. (2005). *Perkembangan Militer dalam Politik di Indonesia 1945-1966*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Skripsi dan Tesis

- Lia Rohmawati. (2004). Peranan Divisi Siliwangi dalam Penumpasan Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat (1949-1962). *Skripsi*. Yogyakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Bambang Imam Eka Respati Sabirin. (2003). Lajur Kanan Sebuah Jalan: Dinamika Pemikiran dan Aksi Bintang Bulan (Studi Kasus Gerakan Darul Islam 1940-1962). *Tesis*. Depok: Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

Majalah

- Hersri Setiawan dan Joebar Ayoeb. (1982). S. M. Kartosuwiryo, Orang Seiring Bertukar Jalan. *Prisma*, No. 5, Tahun XI, hlm. 79-96.

Dokumen

- Album Peristiwa Pemberontakan DI/TII di Indonesia*. (1978). Jakarta: Disjarah TNI AD.